RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saat ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri ini disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang merupakan implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan serta sebagai arah dan pedoman dalam rangka merealisasikan visi sekaligus menjalankan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri.

Disamping itu Renja ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Adapun susunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Tujuan, Sasaran serta Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang kami sajikan di dalam Renja ini, kiranya masukan dari semua pihak akan menjadi bahan perbaikan bagi kami untuk pengembangan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Kediri, Juli 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEDIRI

ILARIO MENDES, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770414 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 6
1.4 Sistimatika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022 ..... **11**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD 11
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 12
2.1.2. Perkiraan Capaian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 12
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD **37**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2 Tujuan dan sasaran 37
3.1 Program dan Kegiatan 38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD **48**
BAB V P E N U T U P **53**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Berkaitan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain daripada itu, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri, yaitu ***" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani".*** Adapun Misi yang diemban Sekretariat DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, adalah masuk dalam misi ke-2, yaitu ***" Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik "***.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut diatas, Sekretariat DPRD mempunyai sasaran strategis, yaitu ***"Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD"*** dengan indikator kinerja ***"Indeks Kepuasan DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD"***.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD serta berdasarkan struktur organisasi Sekretariat DPRD, maka ditetapkan pula sasaran indikator kinerja pada tiap-tiap Bagian yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya fasilitasi keuangan, perencanaan, dan verifikasi pertanggungjawaban
2. Terfasilitasi ketatausahaan, kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD serta penyiapan keprotokolan Pimpinan DPRD,
3. Meningkatnya fasilitasi koordinasi/konsultasi, rapat-rapat, peningkatan kapasitas DPRD, serta fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD,
4. Meningkatnya fasilitasi fungsi legislasi, pengkajian regulasi dan asistensi perundang-undangan, pengolahan dan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33);
34. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri Nomor : Pimp. 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kediri Tahun Sidang 2022/2023 – 2023/2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2024 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu merealisasikan visi dan menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Kediri yang diwujudkan dengan menetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu " *Meningkatknya kualitas fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD* "

Adapun tujuannya adalah menjabarkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta menetapkan target kinerja dan pendanaan selama satu tahun ke depan sebagai bentuk komitmen untuk pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai acuan dalam penyusunan :

a. Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka diharapkan Renja dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

   Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi :

   a. Pelaksanaan perumusan kebijakan Sekretariatan DPRD ;
   b. Pelaksanaan perumusan program dan kegiatan teknis Sekretariat DPRD ;
   c. Penyusunan rencana, pengelolaan, penelaahan, pengoordinasian perumusan kebijakan Pimpinan DPRD ;
   d. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, aset, kehumasan dan protokol, kepegawaian, persidangan, dan perundang-undangan ;
   e. Pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis rapat-rapat, peninjauan dan pertemuan oleh DPRD ;
   f. Pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD ;
   g. Pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pengelolaan tata usaha dan keuangan ;

h. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerja sama antar daerah/lembaga/pihak lain serta penyediaan tenaga ahli ;
i. Pengintegrasian dan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD ;
j. Pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
k. Penyelenggaraan dokumentasi hukum dan kegiatan DPRD serta kehumasan, keprotokolan, publikasi dan informasi ;
l. Pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pengumpulan bahan, penelitian dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan produk hukum daerah ;
m. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati ; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan visi misi Sekretariat DPRD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, yang berkaitan dengan penyusunan Renja SKPD,

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan dan perkiraan capaian Renstra, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja dan kendala yang dihadapi serta faktor yang mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri

Memuat tentang cara meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

Memuat tentang perbandingan antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat tentang penjelasan proses usulan program/kegiatan serta kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas poko dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Memuat tujuan dan sasaran Renja berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.2 Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, penjelasan ketidaksesuaian dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan serta proyeksi pencapaiannya.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana periode sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri yang merupakan penjabaran perencanaan tahunan tersebut, pencapaian kinerjanya dijabarkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri. Yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Penilaian akuntabilitas kinerja diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta membantu menciptakan tolok ukur kinerja sebgai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berkaitan hal tersebut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri disusun untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja kegiatan selama tahun berjalan. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Sasaran Kinerja.
   Sasaran Kinerja merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

b. Capaian Kinerja.
   Adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022

Secara umum pencapaian program dan kegiatan di Tahun 2022 Sekretariat DPRD mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan pada tahun tersebut masih dalam status pandemi penyakit *Cavid 19* sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) dengan dukungan anggaran sebesar Rp**.** 73.900.000.000,- Adapun realisasi belanja sebesar 79,79% atau senilai Rp. 58.964.633.964,-

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada 2 program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Pencapaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 37.681.366.459,13 atau sebesar 87,05%. Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 15.588.755.840,00 atau tercapai 54,64%.

Dari data pencapaian realisasi keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam kategori rendah. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan optimal seperti; kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Peningkatan Kapasitas DPRD, dan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut harus mentaati prosedur pencegahan penularan *Covid-19* yang sangat ketat dan terbatas, sehingga belanja makanan minum rapat dan belanja perjalanan dinas tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

2.1.2. Perkiraan Capaian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023

Adapun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri pada Tahun 2023 mengacu pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 69.837.948.870,- dimana realisasi Tahun berjalan (Triwulan II) sebesar Rp. 29.195.761.325,00 atau 41,81 % terdiri dari :

1. Balanja Operasional terdiri :

- Belanja Gaji

  Belanja gaji terdiri dari Gaji Anggota DPRD dan Gaji ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri. Tahun Angaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri menganggarkan belanja gaji sebesar Rp. 33.570.875.929,- telah terrealisasi sebesar Rp 16.575.275.462,- pada Triwulan II atau 49,37 %.

- Belanja Barang dan Jasa :

  Belanja barang, jasa dan modal merupakan belanja untuk melaksanakan program kegiatan dalam melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Tahun Angaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri menganggarkan belanja barang/jasa dan modal sebesar Rp 35.980.881.621,- realisasi tahun berjalan (Triwulan I) sebesar Rp. 12.570.545.863,- atau 34,93 % .

- Belanja Modal

  Adapun khusus belanja modal pada tahun 2023 ini dianggarkan belanja modal sebesar Rp. 286.191.320,- dimana pada semester I ini baru dapat direalisasikan sebesar Rp. 49.940.000,- atau 17,44%.

  Berdasarkan realiasasi capaian pada semester I diatas masih tergolong capaian kinerja yang rendah, sehingga diharapkan pada semester II nanti capaian kinerja dapat lebih ditingkatkan.

  Adapun evaluasi pelaksanan rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun berjalan (Semester II) Tahun 2023 dapat dijabarkan di tabel 2.1

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Capaian Program (*Renstra*) Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu(2022)			Target Program/ Kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah	Realiasasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
4					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4	**02**				**Sekretariat DPRD**									
4	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah***	**90**	**87**	**82**	**89**	***108 %***	**85**	**87**	**96 %**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	12 dokumen	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	6 dokumen	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	6 dokumen	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**									
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	26 Orang Bulan	26 Orang Bulan	26 Orang Bulan	26 Orang Bulan		26 Orang Bulan	26 Orang Bulan	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	70 dokumern	12 dokumern	12 dokumern	12 dokumern		12 dokumern	36 dokumern	

4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran/ Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	3 laporan	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat sesuai tupoksi	120 Orang	16 Orang Bulan	24 Orang Bulan	9 Orang Bulan		24 Orang Bulan	49 Orang Bulan	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket		12 paket	36 paket	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan Rumah Tangga	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket		12 paket	36 paket	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket		4 paket	12 paket	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	

4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	60 unit	12 unit	12 unit	12 unit		12 unit	36 unit	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	9 unit	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 unit	20 unit	20 unit	20 unit		20 unit	60 unit	
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	6 unit	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung dan bangunan lainnya yang direhab	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	6 unit	
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	6 unit	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**									
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan	250 org/bulan	50 org/bulan	50 org/bulan	50 org/bulan		50 org/bulan	250 org/bulan	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota DPRD yang tersedia	25 paket	5 paket	5 paket	5 paket		5 paket	15 paket	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	250 Orang	41 Orang	50 Orang	23 Orang		50 Orang	114 Orang	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**									
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	

4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	***Persentase pelaksanaan dukungan kinerja DPRD***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	***100%***	**100%**	**100%**	**100%**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**									
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	**02**	**03**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**									
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan**									
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	

						Infrastruktur									
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**									
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.04	03	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	3 Orang	4 Orang	8 Orang		4 Orang	15 Orang	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang		7 Orang	21 Orang	
4	02	02	2.04	05	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.04	06	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.04	07	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**									
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	

						Pokok Pikiran DPRD yang Disusun									
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**									
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	3Laporan	
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**									
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3Dokumen	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**									
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.08	02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3Dokumen	

Mengetahui
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kediri

ILARIO MENDES, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770414 199803 1 005

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Analisa capaian kinerja cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pelayanan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* lainya dengan indikator yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Kediri menggunakan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Hasil Pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator sasaran yang didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat dijadikan dasar sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tahun bersangkutan.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri mencakup :

a. Kinerja kegiatan dan sub kegiatan merupakan tingkat pencapaian target masing-masing kelompok indikator,

b. Tingkat capaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Aksi, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dari rencana kerja yang telah ditetapkan, beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Tidak semua kegiatan yang sudah disepakati dalam Rencana Kerja terlaksana, hal ini disebabkan karena semua kegiatan harus melalui persetujuan dalam rapat Badan Musyarawah (Bamus) DPRD.

2. Kegiatan diluar jadwal, seperti unjuk rasa dari masyarakat, pengaduan yang sifatnya mendesak.

3. Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana tepat waktu, hal ini disebabkan karena :
    a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD yang belum memadai,
    b. Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat,

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum maksimal sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal,
d. Kurangnya refrensi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

4. Adanya kepentingan politik yang dapat menghambat pelaksanaan Rencana Kinerja kegiatan.

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah yang sangat mendukung fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan anggaran yang memadai,
2. Hubungan koordinasi yang sinergis antara pimpinan unit untuk mendukung fungsi pelayanan dan pengawasan sehingga tercipta hubungan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, maka untuk mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang dihadapi, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana,
2. Sinkronisasi jadwal kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah,
3. Memberdayakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
4. Melaksanakan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada.

TABEL : 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEDIRI

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	-	-	**75**	**77**	**80**	**83**	**85**	**87**	**86,25**	**88**	Survey IKM

Mengetahui
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kediri

ILARIO MENDES, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770414 199803 1 005

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Agar visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri yang sudah dicanangkan dalam rencana strategis yakni meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel, maka ditempuh berbagai cara antara lain :

1. Memberdayakan tenaga yang ada dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dengan mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Mengadakan pembinaan kepada pegawai secara rutin dan berkala tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan disiplin pegawai.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi Informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2024, berdasarkan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024, yaitu *Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan didukung birokrasi melayani untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat*. Selain itu juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dimana pada tahun 2024 diperkirakan kemampuan keuangan daerah mengalami defisit yang relatif tinggi. Setelah melalui sinkronisasi dengan Bappeda, besaran plafon pada RKPD Tahun 2024 ini mengalami penurunan dibanding dengan plafon pada Renstra Sekretariat DPRD.

Adapun setelah dilakukan pemetaan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD mempunyai 2 program, 17 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel : 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : **Sekretariat DPRD**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Terget Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Terget Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**38.980.320.600**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***				**38.980.320.600**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**62,854,375**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**62,854,375**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.027.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.027.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.360.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.360.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.629.979.567**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.629.979.567**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	26 orang/bulan	3.584.224.955	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	26 orang/bulan	3.584.224.955	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	889.853.612	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	889.853.612	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12.780.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12.780.000	

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.868.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.868.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	128.253.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	128.253.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**408.400.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**408.400.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	408.400.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	1 Laporan	408.400.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**175.352.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**175.352.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat sesuai tupoksi	24 orang	175.352.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat sesuai tupoksi	24 orang	175.352.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.066.484.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.066.484.500**	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	660.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	660.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah paket penyediaan peralatan Rumah Tangga	12 paket	101.993.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah paket penyediaan peralatan Rumah Tangga	12 paket	101.993.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 paket	135.371.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 paket	135.371.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	47.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	47.520.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD	1 Laporan	121.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD	1 Laporan	121.600.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**272.050.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**272.050.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	272.050.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	272.050.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.340.706.650**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.340.706.650**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	12 unit	373.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	12 unit	373.800.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah mebel yang dipelihara	3 unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah mebel yang dipelihara	3 unit	6.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	271.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	271.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	2 unit	369,600,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	2 unit	369,600,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah sarana gedung dan bangunan lainnya yang direhab	2 unit	199.739.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah sarana gedung dan bangunan lainnya yang direhab	2 unit	199.739.080	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	2 unit	93.567.570	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	2 unit	93.567.570	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				**29.936.631.183**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**29.936.631.183**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan	50 org/bulan	29.389.407.483	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan	50 org/bulan	29.389.407.483	

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah paket pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota DPRD yang tersedia	5 paket	497.223.700	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah paket pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota DPRD yang tersedia	5 paket	497.223.700	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	50 orang	50,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	50 orang	50,000,000	
	Layanan Administrasi DPRD				**1.142.329.700**	**Layanan Administrasi DPRD**				**1.142.329.700**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 dokumen	96.800.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 dokumen	96.800.000	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	1 Laporan	43.874.700	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	1 Laporan	43.874.700	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan hasil fasilitasim Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	1 Laporan	1.001.655.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah laporan hasil fasilitasim Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	1 Laporan	1.001.655.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				**11.882.184.300**	***PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***				**11.882.184.300**	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				**1.482.692.000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**1.482.692.000**	

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	70.690.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	70.690.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	542.508.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	542.508.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	672.894.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	672.894.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	196.600.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	196.600.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran				**1.802.753.700**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**				**1.802.753.700**	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	342.396.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	342.396.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	342.396.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	342.396.000	

	Pembahasan APBD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	54.581.700	Pembahasan APBD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	54.581.700	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	342.396.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	342.396.000	
	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	342.396.000	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	342.396.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	378.588.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	378.588.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				**3.123.108.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**3.123.108.000**	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	365.374.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	365.374.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	400.968.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	400.968.000	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	365.374.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	365.374.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	400.968.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	400.968.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	682.334.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	682.334.000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	630.860.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	630.860.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	277.230.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	277.230.000	

	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo			**2.696.424.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo			**2.696.424.000**	
	Orientasi DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	363.600.000	Orientasi DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	363.600.000	
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	734.366.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	734.366.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	144.866.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	144.866.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	420,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	420,000,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	251.200.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	251.200.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	636.862.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	636.862.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	285.530.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	285.530.000	

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				**960.096.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**960.096.000**	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	74.584.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	74.584.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	14.220.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	14.220.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	871.292.000	Pelaksanaan Reses	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	871.292.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				**148.088.000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**				**148.088.000**	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	1 Laporan	148.088.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	1 Laporan	148.088.000	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah				**26.335.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**				**26.335.000**	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	1 Dokumen	26.335.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	1 Dokumen	26.335.000	

	Fasilitasi Tugas DPRD				**1.642.687.600**	**Fasilitasi Tugas DPRD**				**1.642.687.600**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	694.249.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	694.249.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	279.956.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	279.956.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	668.482.600	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kediri, Ngasem, Sukorejo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	668.482.600	
	TOTAL				**50.862.504.900**					**50.862.504.900**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa produk perencanaan disusun dengan memperhatikan aspek politis, partisipatif, *buttom up* dan *top down*. Dengan demikian melalui tahapan dan proses sesuai ketentuan diharapkan semua aspirasi pembangunan dari semua *stakeholder* dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skala prioritas rencana pembangunan.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator kegiatan DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam menyusun rencana kerja memperhatikan prioritas pembangunan nasional maupun daerah, dokumen Renstra Sekretariat DPRD serta isu isu strategis yang sedang terjadi serta hasil forum-forum Musrenbang.

Selain itu memperhatikan hasil forum Musrenbang pada tahapan forum perangkat daerah dan Forum Musrenbang Tingkat Kabupaten, Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2024 setelah melalui proses sinkronisasi yang dilaksanakan bersama Bappeda dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, belum ada usulan masyarakat yang secara langsung dapat ditampung dalam program, kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025, Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, dirasa perlu melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena Reformasi Birokrasi bertujuan mewujudkan ASN yang profesional memiliki karakteristik, berintegrasi,berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sekretariat DPRD adalah penyelenggara fungsi penunjang lainnya, dimana didalam RPJMD 2021-2026 isu strategis tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan tupoksi Sekretariat DPRD termasuk dalam Misi 2 yaitu *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*

Reformasi birokrasi dalam bidang sumber daya aparatur Sekretariat DPRD bertujuan menjadi *fasilitator profesional dan independen*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diuraikan dalam beberapa strategi, yaitu :

a. Memberikan fasilitasi dan asistensi DPRD dalam kegiatan dan persidangan DPRD, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran.
b. Memberikan fasilitasi dan asistensi DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam bidang legislasi,
c. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan urusan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, rumah tangga dan aset, dan keuangan DPRD.
d. Meningkatkan fasilitasi tata usaha, kehumasan dan keprotokolan

3.2 Tujuan dan sasaran

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2024 dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai :

Tujuan

Tujuan merealisasikan visi dan menjalankan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dalam kurun waktu lima tahun kedepan telah ditetapkan satu tujuan yaitu "*Meningkatkan fasilitasi dalam mendukung kinerja DPRD*"

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Jangka waktu pencapaian sasaran lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan, yaitu *Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD*

Uraian sasaran menurut tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya fasilitasi keuangan, perencanaan, rumah tangga dan pengelolaan aset
2. Meningkatnya fasilitasi ketatausahaan, kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD serta penyiapan keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD,
3. Meningkatnya fasilitasi urusan persidangan, rapat-rapat, kunjungan dan pertemuan DPRD, serta fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD,
4. Meningkatnya fasilitasi pengkajian regulasi dan asistensi perundang-undangan, pengolahan dan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan.

Sasaran ini dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Aset, Bagian Umum dan Humas, Bagian Persidangan dan Bagian Perundang-undangan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran diatas diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

3.1 Program dan Kegiatan

a. Program

Program kerja operasional pada dasarnya upaya implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Dengan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk Tahun 2024 dirumuskan dalam 2 (dua) program kerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

b. Kegiatan

Strategi implementasi perencanaan strategis setelah penetapan kebijakan dan program kerja organisasi adalah perumusan dan penetapan kegiatan atau aktivitas dominan dan vital.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian dari perencanaan strategis adalah merupakan upaya untuk peningkatan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja akan diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program dan dijabarkan ke dalam kegiatan instansi pemerintah yang disusun dengan dimensi tahunan. Dengan memperhatikan kriteria spesifik dan terukur sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan dapat direalisasikan dalam waktu relatif pendek, program kegiatan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri dirumuskan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Layanan Administrasi DPRD
10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
11. Pembahasan Kebijakan Anggaran
12. Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
13. Peningkatan Kapasitas DPRD
14. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
15. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
16. Pembahasan Kerja Sama Daerah
17. Fasilitasi Tugas DPRD

c. Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk Tahun 2024 dirumuskan dalam 60 (enam puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18. Pemeliharaan Mebel
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
24. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
25. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
26. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
27. Fasilitasi Fraksi DPRD
28. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
29. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
30. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
31. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
32. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

33. Pembahasan KUA dan PPAS
34. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
35. Pembahasan APBD
36. Pembahasan APBD Perubahan
37. Pembahasan Laporan Semester
38. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
39. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
40. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
41. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
42. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
43. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
44. Pengawasan Penggunaan Anggaran
45. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
46. Orientasi DPRD
47. Pendalaman Tugas DPRD
48. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
49. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
50. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
51. Penyusunan Program Kerja DPRD
52. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
53. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
54. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
55. Pelaksanaan Reses
56. Pengawasan Kode Etik DPRD
57. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
58. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
59. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
60. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang telah disusun diperlukan pendanaan memadai serta memuat indikator sasaran, output. Capaian kinerja sebagaimana penjabaran pada tabel. 3.1.

TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
4	**02**				**Sekretariat DPRD**				**50.862.504.900**				
4	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**38.980.320.600**				
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**8.387.000**				
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	4 dokumen	4.027.000	APBD			0
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	2 dokumen	2.000.000	APBD			0
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	2 dokumen	2.360.000	APBD			0
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**				**4.629.979.567**				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Sekretariat DPRD	26 Orang Bulan	3.584.224.955	APBD			0
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sekretariat DPRD	12 dokumern	889.853.612	APBD			0
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	12.780.000	APBD			0
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	14.868.000	APBD			0

						Pemeriksaan							
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran/ Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	222.228.000,00				
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				457.600.000,00	APBD			0
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Sekretariat DPRD	24 Orang Bulan	457.600.000,00	APBD			0
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				260.872.000,00	APBD			0
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat sesuai tupoksi	Sekretariat DPRD	24 Orang Bulan	260.872.000,00	APBD			0
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				1.715.063.000,00	APBD			0
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 paket	1.016.554.500,00	APBD			0
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	12 paket	129.727.500,00	APBD			0
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	4 paket	234.925.000,00	APBD			0
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	58.188.000,00	APBD			0
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	275.668.000,00	APBD			0
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				351.550.000,00	APBD			0
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD	12 Laporan	351.550.000,00	APBD			0
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				1.357.206.630,00	APBD			0
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Sekretariat DPRD	12 unit	414.300.000,00	APBD			0

4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Sekretariat DPRD	3 unit	9.000.000,00	APBD			0
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sekretariat DPRD	20 unit	271.000.000,00				
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Sekretariat DPRD	2 unit	369.600.000,00				
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung dan bangunan lainnya yang direhab	Sekretariat DPRD	2 unit	199.739.060,00	APBD			0
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	Sekretariat DPRD	2 unit	93.567.570,00	APBD			0
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				29.936.631.183	APBD			0
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan	Sekretariat DPRD	50 org/bulan	29.389.407.483	APBD			0
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota DPRD yang tersedia	Sekretariat DPRD	5 paket	497.223.700				
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	Sekretariat DPRD	50 Orang	50.000.000	APBD			0
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**				1.142.329.700	APBD			0
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	96.800.000	APBD			0
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	43.874.700				
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	1.001.655.000				
4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				**11.882.184.300**				
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**1.482.692.000**	APBD			0
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	70.690.000	APBD			0
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	542.508.000	APBD			0
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat	1 Dokumen	672.894.000				

					Undangan		DPRD						
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	196.600.000	APBD			0
4	**02**	**03**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**				**1.802.753.700**	APBD			0
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	342.396.000	APBD			0
4	02	02	2.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	342.396.000	APBD			0
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	54.581.700	APBD			0
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	342.396.000	APBD			0
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	342.396.000	**APBD**			
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	378.588.000	APBD			0
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan**				**3.123.108.000**	APBD			0
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	1 Laporan	365.374.000	APBD			0
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	1 Laporan	400.968.000	APBD			0
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	1 Laporan	365.374.000	APBD			0
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	1 Laporan	400.968.000	APBD			0
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	682.334.000				
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	630.860.000	APBD			0
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Sekretariat	1 Dokumen	277.230.000	APBD			0

					Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	DPRD						
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**				**2.696.424.000**	APBD			0
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	363.600.000	APBD			0
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	734.366.000	APBD			0
4	02	02	2.04	03	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	285.530.000	APBD			0
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	2 Kegiatan	144.866.000	APBD			0
4	02	02	2.04	05	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	420.000.000	APBD			
4	02	02	2.04	06	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	12 Bulan	251.200.000	APBD			0
4	02	02	2.04	07	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	636.862.000	APBD			0
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			3 Kegiatan	**960.096.000**	APBD			0
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Sekretariat DPRD		74.584.000				
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	14.220.000	APBD			0
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD		871.292.000				
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**			**100%**	**148.088.000**	APBD			0
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	148.0880-.00				
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**			**100%**	**26.335.000**	APBD			0
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	26.335.000	APBD			0
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**			**100%**	**1.642.687.600**	APBD			0

4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Sekretariat DPRD	1 tahun	694.249.000				
4	02	02	2.08	02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	1 tahun	279.956.000				
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	1 tahun	668.482.600				

Mengetahui
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kediri



ILARIO MENDES, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770414 199803 1 005

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam rencana kerja ini mendefenisikan seluruh Tujuan, Sasaran Strategis, kebijakan, dan program kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bersama bagi Sekretariat DPRD untuk mencapainya dalam satu tahun anggaran.

Adapun rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BELANJA LANGSUNG	SUMBER DANA
4					**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**			
4	**02**				**Sekretariat DPRD**		50.862.504.900	
4	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		38.980.320.600	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**8.387.000**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	4.027.000	DAU
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	DAU
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.360.000	DAU
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**		**4.629.979.567**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	3.584.224.955	DAU
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	889.853.612	DAU
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.780.000	DAU
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	14.868.000	DAU
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran/ Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	222.228.000,00	DAU
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**457.600.000,00**	
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	457.600.000,00	DAU
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**260.872.000,00**	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/diklat sesuai tupoksi	260.872.000,00	DAU
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.715.063.000,00**	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.016.554.500,00	DAU

4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan Rumah Tangga	129.727.500,00	DAU
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	234.925.000,00	DAU
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	58.188.000,00	DAU
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi SKPD	275.668.000,00	DAU
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**351.550.000,00**	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	351.550.000,00	DAU
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.357.206.630,00**	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	414.300.000,00	DAU
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	9.000.000,00	DAU
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	271.000.000,00	DAU
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan jasa kebersihan yang terlaksana	369.600.000,00	DAU
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung dan bangunan lainnya yang direhab	199.739.060,00	DAU
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	93.567.570,00	DAU
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**29.936.631.183**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan	29.389.407.483	DAU
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota DPRD yang tersedia	497.223.700	DAU
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	50.000.000	DAU
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**		**1.142.329.700**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	96.800.000	DAU
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	43.874.700	DAU
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	1.001.655.000	DAU
4	**02**	**02**			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		11.882.184.300	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**1.482.692.000**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	70.690.000	DAU

4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	542.508.000	DAU
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	672.894.000	DAU
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	196.600.000	DAU
4	**02**	**03**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**1.802.753.700**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	342.396.000	DAU
4	02	02	2.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	342.396.000	DAU
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	54.581.700	DAU
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	342.396.000	DAU
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	342.396.000	DAU
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	378.588.000	DAU
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan**		**3.123.108.000**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	365.374.000	DAU
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	400.968.000	DAU
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	365.374.000	DAU
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	400.968.000	DAU
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	682.334.000	DAU
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	630.860.000	DAU
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	277.230.000	DAU
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**2.696.424.000**	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	363.600.000	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	734.366.000	DAU
4	02	02	2.04	03	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	285.530.000	DAU
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	144.866.000	DAU

4	02	02	2.04	05	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	420.000.000	DAU
4	02	02	2.04	06	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	251.200.000	DAU
4	02	02	2.04	07	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	636.862.000	DAU
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**960.096.000**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	74.584.000	DAU
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	14.220.000	DAU
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	871.292.000	DAU
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**148.088.000**	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	148.0880-.00	DAU
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**26.335.000**	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	26.335.000	DAU
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**		**1.642.687.600**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	694.249.000	DAU
4	02	02	2.08	02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	279.956.000	DAU
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	668.482.600	DAU

Mengetahui
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kediri

ILARIO MENDES, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19770414 199803 1 005

BAB V
P E N U T U P

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari capaian indikator sasaran Tahun 2023 pada Triwulan II sebesar 41,81 %, diharapkan sampai dengan akhir tahun sasaran kinerja seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Bertolak dari capaian indikator sasaran tahun berjalan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, diharapkan untuk Tahun 2023 rencana kerja yang dirumuskan dalam 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan, target yang ditetapkan tercapai 90 % dan diharapkan lebih meningkat lagi.

Meskipun rencana kerja ini telah disusun dengan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kebutuhan bersifat strategis, kami menyadari bahwa untuk mencapai target tidaklah mudah, mengingat keterbatasan sumber daya baik kuantitas maupun kualitas, serta ketidakpastian persetujuan DPRD melalui Badan Musyawarah dalam memberikan persetujuan terhadap sebagian besar pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dalam bentuk fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD. Untuk itu kami sangat memerlukan masukan berupa saran, pendapat, serta kritik yang membangun sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam upaya penyempurnaan penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Kediri, Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEDIRI

ILARIO MENDES, S.STP, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19770414 199803 1 005